MAYORITAS BERADA DI BANTARAN SUNGAI

Penataan Kawasan Kumuh Andalkan APBD Kota Yogya

YOGYA (KR) - Program penataan kawasan kumuh di Kota Yogya kini tidak lagi mendapat alokasi pendanaan dari pusat maupun provinsi. Seluruh kegiatan yang digulirkan tahun ini mengandalkan APBD Kota Yogya 2023. Khususnya penataan yang dilakukan di tiga lokasi yakni Prawirodirjan, RW 05 Klitren, dan RW 08 Pakuncen.

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogya Sigit Setiawan, mengatakan pada tahun ini penataan kawasan kumuh di Kota Yogya hanya mendasarkan pada indikator kumuh paling dominan yang belum tertangani. "Polanya kalau yang dulu kalau masih bisa kolaborasi dengan APBN, sehingga bisa semua indikator disentuh. Kalau tahun ini pada indikator kumuh yang menonjol," jelasnya, Jumat (25/8).

Total luasan kawasan kumuh di Kota Yogya saat ini tersisa sekitar 89,36 hektare. Dari luas kawasan kumuh tersebut mayoritas berada di area bantaran sungai yakni mencapai sekitar 77 hektare. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir penataan kawasan kumuh selalu identik dengan menyasar bantaran sungai. Di antaranya meliputi pembangunan jalan inspeksi, penataan untuk ruang terbuka publik dan sanitasi.

Sigit menjelaskan, setiap lokasi yang menjadi sasaran program penataan kawasan kumuh dianggarkan Rp 700 juta hingga Rp 900 juta untuk tiap paket pekerjaan. Seperti paket pekerjaan di Prawirodirjan untuk mengembalikan fungsi lahan Sultan Ground (SG) yang dulunya dihuni warga guna kepentingan fasilitas publik. Pihaknya berkolaborasi dengan Kelurahan Prawirodirjan yang sudah memiliki rencana induk penataan.

Konsep penataan untuk fasilitas ruang terbuka publik di bantaran sungai dengan pembangunan pendopo, amphitheater, toilet dan taman dilengkapi tempat bermain anak. Penataan kawasan kumuh di Prawirodirjan ditargetkan selesai pada Oktober 2023. Penataan kawasan kumuh di Prawirodirjan saat ini sedang berlangsung. Pembangunan berada di sepanjang bantaran Kali Code tepatnya di selatan Bendung Mergangsan. "Pola penataannya kami ingin mendekatkan sungai sebagai area yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Selama ini talut seolah memisahkan antara sungai dengan area permukiman. Karena spacenya ada, kami coba buat amphitheater sehingga harapannya nanti sungai itu adalah wahana bersama, bisa kita jaga sama sama," paparnya.

Sedangkan khusus di Pakuncen dan Klitren, indikator kumuh yang belum tertangani dari sisi sanitasi dan membuka akses jalan tepi sungai. Diharapkan dengan penanganan kumuh pada sanitasi itu bisa menurunkan skor indikator sehingga tidak masuk kumuh. Ditargetkan penataan kawasan kumuh di Klitren selesai pada November 2023. "Di Klitren dan Pakuncen fokusnya ke penataan sanitasi dan jalan tepi sungai. Jadi nantinya dari sisi operasional untuk pemeliharaan talut maupun mitigasi kalau terjadi longsor dan sebagainya akan lebih mudah kalau ada jalan inspeksi," tandasnya. **(Dhi)-f**

KR-Istimewa

Kegiatan penataan kawasan kumuh di bantaran Kali Code kawasan Prawirodirjan.

PWNU DIY KELUARKAN SURAT EDARAN

Ajak Nahdliyin Ikut Atasi Masalah Sampah

YOGYA (KR) - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (PWNU DIY) turun tangan untuk membantu mengatasi masalah sampah. Untuk itu PWNU DIY mengeluarkan surat edaran tentang sampah yang ditandatangani Dr H A Zuhdi Muhdlor SH MHum (Ketua Tanfidziyah) dan Dr H Muhajir SPdI MSi.

Melalui surat edaran tersebut PWNU DIY memerintahkan kepada Pengurus Cabang, Majelis Wakil Cabang, dan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama agar aktif berkoordinasi dengan pemerintah setempat, instansi terkait, lembaga swadaya strategis dan warga Nahdliyin dalam upaya menyelesaikan masalah sampah.

Selain itu juga mengajak setiap keluarga di lingkungan Nahdliyin memilah sampah berdasarkan jenisnya (sampah organik, sampah daur-ulang, sampah residu), dan memasukkannya ke dalam kantong/bak sampah yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya tersebut.

Juga mengajak segenap warga Nahdliyin sebagai bagian dari anggota kemasyarakatan pada

umumnya untuk turut aktif menangani masalah sampah di level Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) atau di lingkup komunitasnya masing-masing. Mendorong dihasilkannya desain pengelolaan sampah komunitas pada setiap Ranting Nahdlatul Ulama yang merupakan hasil kerjasama antara warga, pemerintah setempat dan berbagai lembaga strategis.

Juga mengajak pesantren-pesantren, masjid-masjid, madrasah-madrasah, lembaga pendidikan dan forum-forum pengajian untuk mengajarkan dan meneladankan praktik baik dalam pengelolaan sampah di lingkungannya masing-masing. "Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2019 di Kota Banjar Jawa Barat juga telah merekomendasikan agar Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyyah diniyyah ijtimaa'iyyah berperan menanggulangi masalah sampah secara bersama-sama," jelas Zuhdi Muhdlor. **(Fie)-f**

BERENCANA DIJADIKAN ROLE MODEL SISTEM KEAMANAN

Baharkam Polri Akan Adopsi Penerapan Jaga Warga

YOGYA (KR) - Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri berencana mengadopsi penerapan Jaga Warga menjadi role model bagi sistem keamanan di seluruh Indonesia. Berbagai upaya hasil sinergi dari polisi, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk membangun rasa aman di tengah masyarakat melalui Jaga Warga tersebut diharapkan bisa menjadi contoh pemeliharaan Kamtibmas di berbagai daerah lain.

"Kunjungan kami selain bersilaturahmi juga untuk memahami kebijakan-kebijakan beliau berkaitan dengan pemeliharaan Kamtibmas di wilayah DIY. Daerah ini memiliki program unggulan yang disebut Jaga Warga. Rencana kami dengan informasi dari beliau akan menjadi role model bagi sistem dalam kepolisian di seluruh Indonesia, sehingga bisa menjadi contoh di berbagai tempat. Terutama bagaimana polisi dan masyarakat serta pemerintah bersinergi membangun rasa aman di tengah-tengah masyarakat," kata Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi (Karorenmin) Baharkam Polri, Brigjen Pol Agung Julianto SIK MSi usai bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedhong Wilis Kompleks Kepatihan, Jumat (25/8).

Agung mengungkapkan, apabila berkaca dari implementasi Jaga Warga, salah satu pesan yang disampaikan Sultan adalah menggunakan kearifan lokal sebagai pendekatan dalam membangun dan memelihara Kamtibmas. Tentunya semua itu melibatkan masyarakat untuk bersama-sama bertanggung jawab tentang situasi keamanan di wilayahnya masing-masing.

"Dengan *wejangan-wejangan* dari Ngarsa Dalem kami akan membuat kebijakan, bagaimana kita membangun sinergi antar tiga unsur. Yaitu polisi, masyarakat dan pemerintah daerah, untuk bersama-sama membuat kebijakan pemolisian sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Indonesia tentunya sangat beragam karakteristik masyarakatnya, geografisnya, juga demografisnya. Yogya kita harapkan mampu menjadi role model untuk kegiatan dalam kepolisian itu," terangnya.

Menurut Agung, dalam kesempatan itu Sultan berkenan memberikan berbagai *wejangan* terkait upaya pemeliharaan Kamtibmas secara langsung dalam rapat kerja teknis yang akan diadakan Baharkam Polri pada 12 September mendatang di DIY. Rapat kerja teknis Baharkam Polri yang rencananya dihadiri oleh seluruh pejabat direktorat dari seluruh Polda tersebut akan membahas mengenai bagaimana kebijakan kepolisian ke depan. Khususnya dalam menghadapi situasi keamanan menyongsong pemilu 2024. **(Ria)-f**

LDII Apresiasi Kapolda DIY Wujudkan Masyarakat Taat Hukum

KR-Istimewa

Atus Syahbudin dan jajaran pengurus LDII DIY bersama Kapolda DIY.

YOGYA (KR) - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LDII DIY Ir Atus Syahbudin SHut MAgr PhD IPU mengapresiasi kinerja Kopolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan SIK MH dan jajaran yang telah menciptakan kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Apresiasi juga disampaikan Atus, karena Kapolda DIY sudah turut mendukung suksesnya Kerja Bakti Nasional LDII 2023. Kegiatan tersebut dalam rangka merayakan HUT ke-78 RI sekaligus menyongsong Rakernas LDII pada November 2023 di Jakarta.

"Terima kasih Pak Kapolda atas dukungannya terhadap kegiatan Kerja Bakti Nasional LDII 2023 dan program amal saleh Kyai Peduli Sampah. Yogya sedang darurat sampah sehingga tepat kiranya warga masyarakat semakin peduli dan mencintai lingkungannya," terangnya saat bersilaturahmi di Mapolda DIY beberapa waktu lalu.

Dalam silaturahmi tersebut, Atus Syahbudin didampingi Kabiro Hukum dan Hak Asasi Manusia H Rosyid I SH SSos dan Ustaz Endri Sulistyo, Biro Pendidikan Keagamaan dan Dakwah DPW LDII DIY.

Sementara itu, Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo berjanji akan selalu memantau keamanan di DIY dan menyelesaikan permasalahan yang ada dengan gaya masyarakat Yogyakarta. "Yogya ini beda, ilmu kepolisian mungkin hanya 40 persen, selebihnya harus banyak mengenal kebiasaan dan perilaku masyarakatnya," ucap Suwondo. Untuk itu, Suwondo meminta para Kapolsek yang baru bertugas untuk banyak berbaur dengan masyarakat Yogyakarta, mengobrol sejajar sama tinggi, dan mengajak masyarakat mencintai kepolisian. **(Dev)**-f

RTH PUBLIK BERBASIS KAMPUNG

Padukan Fungsi Ekologis dan Sosiologis

YOGYA (KR) - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya akan terus mengupayakan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) publik berbasis kampung. Sarana tersebut sejauh ini dinilai efektif dalam memadukan fungsi ekologis dan sosiologis di wilayah.

Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik DLH Kota Yogya Rina Aryati Nugraha, menjelaskan pembangunan RTH publik tetap mengedepankan fungsi ekologisnya sehingga area vegetasi hijau lebih banyak. Akan tetapi juga menyediakan fasilitas sosial masyarakat seperti pendopo, toilet dan ruang bermain anak. "Kita mengutamakan fungsi ekologisnya, sehingga banyak vegetasi terutama pohon-pohon. Memang ada fasilitas sosial seperti ada pendopo dan toilet untuk berkegiatan yang skalanya tidak terlalu besar," jelasnya, Jumat (25/8).

Diakuinya banyak masyarakat yang mengharapkan ada RTH publik di wilayahnya. Terutama pada wilayah yang padat penduduk serta kanan-kiri sudah dipenuhi oleh permukiman. Sehingga masyarakat membutuhkan ruang yang dapat dimanfaatkan bersama untuk saling berinteraksi serta asri. Dengan begitu RTH publik yang fungsi utamanya menyeimbangkan kelestarian lingkungan, juga memiliki fungsi sosial.

Rina menambahkan, tahun ini pihaknya membangun tiga RTH publik baru, serta satu pekerjaan melanjutkan tahun lalu. RTH publik yang baru tersebut berada di RW 06 Kampung Bumen Kelurahan Purbayan, RW 11 Kampung Kepuh Kelurahan Klitren dan RW 11 Kelurahan Bumijo. Sedangkan satu pembangunan RTH publik lanjutan tahap II di wilayah Kelurahan Warungboto. "Pembangunan RTH publik dilakukan pada lahan yang telah dibeli Pemkot. Pembangunan itu berdasarkan usulan wilayah. Masyarakat terlebih dulu mengusulkan lahan ke Dinas Pertanahan Tata Ruang Kota Yogya. Setelah lahan itu dibeli Pemkot,baru kami bangunkan RTH publik," urainya.

Semua pembangunan RTH publik juga menggunakan dana APBD Kota Yogya. Masing-masing RTH publik di RW 06 Kampung Bumen dibangun pada lahan seluas sekitar 449 meter persegi dengan nilai kontrak sekitar Rp 262 juta. Kemudian RTH publik RW 11 Kampung Kepuh di lahan seluas sekitar 600 meter persegi dengan nilai kontrak sekitar Rp 237 juta. Sedangkan RTH publik Bumijo seluas sekitar 600 meter persegi dengan anggaran sekitar Rp 198 juta dan telah selesai dibangun. Sementara untuk pembangunan RTH publik di Warungboto tahap II sekitar Rp 197 juta.

Sejauh ini total sudah ada 53 RTH publik berbasis kampung yang telah terbangun di Kota Yogya. Sampai akhir tahun akan bertambah karena saat ini masih ada yang dalam proses pembangunan. Apalagi bekas makam Jopraban Wirobrajan yang telah selesai dipindahkan juga akan dibangun RTH publik. Akan tetapi masih menunggu proses pembahasan APBD Perubahan 2023 yang masih berjalan. "Memang peminatnya banyak untuk RTH publik ini karena dengan lingkungan kanan kiri yang padat penduduk masyarakat memerlukan lokasi untuk untuk beraktivitas sehingga RTH publik ada fungsi sosialnya," terangnya. **(Dhi)-f**

JAMIN MUTU PELAYANAN DAN KESELAMATAN PASIEN

Seluruh Puskesmas Ditarget Raih Akreditasi Paripurna

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya menargetkan seluruh puskesmas yang ada di Kota Yogya mampu meraih akreditasi paripurna. Dari total 18 puskesmas yang ada, sejauh ini baru delapan puskesmas yang berhasil menyabet akreditasi paripurna tersebut.

Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kota Yogya Umi Nur Chariyati, menjelaskan pencapaian akreditasi itu untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dan keselamatan bagi pasien dan masyarakat. "Selain itu juga dapat meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia terutama pada aspek kesehatan baik di puskesmas, klinik ataupun laboratorium," jelasnya, Jumat (25/8).

Delapan puskesmas yang telah meraih akreditasi paripurna ialah Puskesmas Umbulharjo I, Jetis, Pakualaman, Ngampilan, Kraton, Gondokusuman II, Kotagede II, dan Mantrijeron. Diharapkan semua puskesmas di Kota Yogya sudah mendapatkan akreditasi Paripurna pada tahun 2023.

Sementara berdasarkan standar akreditasi sesuai PMK No 34/2022, puskesmas yang mendapatkan akreditasi paripurna dipersyaratkan memenuhi minimal 80 persen memiliki klinik. Selain itu juga memiliki laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, tempat praktek mandiri dokter dan tempat mandiri dokter gigi. "Kami akan terus mendorong peningkatan akreditasi di sejumlah puskesmas yang ada di wilayah untuk mendapatkan akreditasi paripurna atau mendekati sempurna khususnya dalam pelayanan kesehatan," imbuh Umi.

Selain delapan puskesmas yang sudah meraih akreditasi paripurna, masih ada tiga puskesmas yang tengah menunggu hasil akreditasi. Namun demikian masih ada puskesmas yang belum mendapatkan akreditasi paripurna. "Memang masih ada beberapa puskesmas yang belum mendapatkan akreditasi paripurna atau mendekati sempurna. Tetapi masih akan ada survei di akhir Agustus dan awal September 2023. Semoga puskesmas di Kota Yogya semua terakreditasi menciptakan tempat yang nyaman dan berkualitas," jelasnya.

Dirinya berharap, setelah adanya penilaian akreditasi semua puskesmas yang mencapai paripurna terus memberikan pelayanan terbaiknya agar masyarakat terjamin kesehatan, kenyamanan dan keselamatannya. Sedangkan bagi puskesmas yang akan disurvei, diimbau bisa mempersiapkan survei akreditasi sebaik-baiknya dengan mengedepankan semangat dan sikap optimisme meraih hasil terbaik.

Kepala Puskesmas Kotagede II Astuti Yusnita Susila, mengungkapkan rasa syukur dan bangga terhadap pencapaian serta kerja keras jajaran pegawainya yang telah mengantarkan pada akreditasi paripurna. Pencapaian tersebut diperoleh dengan usaha dan perjuangan yang maksimal dalam proses mempersiapkan akreditasi. Pihaknya saat ini juga terus berbenah memperbaiki dan melengkapi sarana prasarana puskesmas sesuai dengan standar. "Kami berharap dan berkomitmen untuk terus melakukan upaya peningkatan mutu dan keselamatan berkelanjutan sebagai bentuk pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," katanya.

Sementara puskesmas yang meraih akreditasi paripurna memiliki sejumlah inovasi layanan. Di antaranya Puskesmas Umbulharjo I dengan program Kelola Laporan Online Posyandu Percepatan Penanganan Cegah Stunting (Kelopo Penting). Kemudian Puskesmas Jetis memiliki program Remaja Cantik Sehat Berseri Bebas Anemia (Macan Seri Protamia) dan Sistem Informasi Akreditasi Puskesmas (SIAP). Selain itu, Puskesmas Pakualaman memiliki Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Puskesmas Ngampilan dengan inovasi Remaja Muda Putri Kendalikan Stunting (Jamu Putri Klenting) serta Puskesmas Kraton berupa Layanan Peken Kemis Kemantren Kraton (Lapis Kraton). **(Dhi)-f**